

Harga Beras Melambung, Pemprov DKI akan Rutin Memantau Bersama Satgas Pangan

JAKARTA (IM) - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan harga beras yang kian naik setiap harinya.

Untuk menekan harga beras yang naik, Pemprov DKI akan bersinergi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog dan ID Food) untuk mengendalikan harga beras tersebut.

Salah satunya, dengan melakukan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap kedua untuk bantuan pangan bagi 304.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) @10 kg per bulan dari bulan September-November 2023.

Kepala Dinas KPKP, Suharni Eliawati juga mengatakan, selain penyaluran CPP, saat ini Pemprov DKI juga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masuk ke gudang Food Station di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk menekan harga beras yang naik.

"Penyaluran beras SPHP kualitas Medium ke masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 54.500,- per kantong isi 5 kg

di toko-toko beras dan pasar modern," ujar Kepala Dinas KPKP, Suharni Eliawati saat di konfirmasi, Selasa (19/9).

Eli sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan rutin dengan satuan tugas (Satgas pangan) ihwal kenaikan harga beras tersebut

"Melakukan Pemantauan stok, harga dan mutu secara rutin bersama Satgas Pangan," ucapnya.

Diketahui, mulai 13 September 2023, pemerintah secara masif menyalurkan beras SPHP ke PIBC dengan tujuan semakin memperluas jangkauan beras SPHP.

Kemudian, untuk tahap awal, Bulog akan mengirimkan total 4.500 ton ke PIBC dengan rincian 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station di PIBC.

Pedagang tingkat eceran dan pasar turunan bisa mendapat beras SPHP dengan harga paling tinggi Rp10.385 per kg dan harga eceran tertinggi masyarakat adalah Rp10.900 per kg.

"Kita meyakini dengan adanya mekanisme penyaluran seperti ini akan mempengaruhi harga beras, terutama beras jenis medium," pungkasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



MENKOP UKM SIDAK PASAR TANAH ABANG
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) menyaksikan pedagang menawarkan produk melalui layanan 'live shopping' di Pasar Tanah Abang Blok A, di Jakarta, Selasa (19/9). Kedatangan Teten Masduki tersebut untuk mengecek secara langsung aktivitas pasar yang cenderung mengalami penurunan selepas Hari Raya Idul Fitri.

PEMERINTAH BERENCANA MEMBENTUK DEWAN REGIONAL

Jakarta Jadi DKJ, Wapres Sebut Cianjur akan Gabung Jabodetabek

Adanya Dewan Regional ini diharapkan mampu mengharmonisasi perencanaan di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan rencana berjalan dengan baik.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah berencana membentuk De-

wan Regional dalam beleid Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Usai Jakarta tidak

menjadi ibu kota negara dan telah berubah status menjadi DKJ, pemerintah berencana membentuk Dewan Regional. Kiai Ma'ruf mengatakan dewan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dari masing-masing kota terhubung, mulai Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, bahkan akan dimasukkan Cianjur. "Ada lagi ya selain sebagai ibu kota, ada akan

dibentuk namanya Dewan Regional. Dewan regional ini meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok kemudian juga Tangerang, bahkan Cianjur dimasukkan," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan di sela kunjungannya ke China seperti dikutip dari keterangan yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden pada Selasa (19/9).

Adanya Dewan Regional ini diharapkan mampu mengharmonisasi perencanaan di wilayah-wilayah tersebut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan rencana berjalan dengan baik. Serta, sebagai upaya agar permasalahan di kota besar tersebut tidak menular ke daerah-daerah lain.

"Jadi akan dibuat semacam Dewan Regional yang mengharmonisasi perencanaan Jabodetabek dan juga bahkan dimasukkan Cianjur, ini dalam RUU itu, itu dimasukkan," ujar Kiai Ma'ruf.

Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf juga menyampaikan Pemerintah tetap akan mempertahankan status Jakarta sebagai daerah khusus meskipun sudah bukan menjadi ibu kota negara. Kiai Ma'ruf menyebut, hal itu telah dibahas dalam rapat kabinet dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh Wapres Ma'ruf beserta para menteri terkait di Istana Merdeka terkait Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pekan lalu. "Sekarang sedang diproses itu pembentukan RUU

DKJ namanya. Jadi Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, tidak lagi menjadi DKI tapi menjadi Daerah Khusus Jakarta," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf mengatakan, perubahan status ini seiring dengan persiapan kepindahan ibu kota ke IKN Nusantara yang terus berproses. Menurutnya, Pemerintah mempertimbangkan aspek sosiologis dan historis Jakarta sehingga membuat wilayah ini tetap dipertahankan kekhususannya. Jakarta selama ini sebagai Ibu Kota negara telah memiliki banyak rekam jejak sebagai pusat pemerintahan dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan.

"Karena historisnya, sebagai ibu kota dan potensi yang ada di Jakarta. Karena itu perlu diberikan sebagai daerah khusus Jakarta dengan mempertimbangkan landasan sosiologis dan historis," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menyampaikan, Pemerintah juga memberikan kewenangan khusus untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta. Kompleksitas permasalahan perkotaan tersebut diantaranya berbagai masalah yang membawa dampak tidak hanya bagi masyarakat di tengahnya kota saja, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.

"Misalnya soal kemacetan, soal polusi, soal banjir dan juga Jakarta sebagai kota ekonomi terbesar di dunia, semacam global lah," ujarnya. ● yan

DPRD DKI tidak Setuju Wacana Cetak Ulang KTP Warga Jakarta

JAKARTA (IM) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William A Sarana, menolak keras wacana pencetakan ulang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pascas-Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

Menurutnya hal itu merupakan pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas.

"Tidak perlu cetak ulang karena akan menghabiskan anggaran. Ada lebih dari 11 juta orang di Jakarta, berapa dana yang dihabiskan? Ini bukanlah hal yang prioritas dilakukan," ucapnya, Selasa (19/9).

Selain pemborosan, tentunya upaya ini akan menyulitkan dan merepotkan warga di DKI Jakarta. Mereka harus ke kelurahan untuk meng-

urus, dan dipastikan kelurahan akan kewalahan untuk melayaninya. "Tentunya, kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di e-KTP," tegasnya.

William juga mengimbau lebih baik perubahan nama DKI menjadi DKK dilakukan dalam database saja, tidak perlu hingga ke fisik dalam KTP.

"Saya menyarankan agar database-nya saja diubah, fisik e-KTP tidak perlu diubah. Untuk pemilik e-KTP baru mungkin yang perlu diubah fisik KTP-nya.

Pemilik KTP pertama kali saja untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta)," urainya. ● yan

TERINDIKASI SUMBANG PENCEMARAN

Dinas Lingkungan Hidup DKI Segel 4 Perusahaan

JAKARTA (IM) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyegel 4 perusahaan yang diindikasikan menyumbang polusi udara Jakarta. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum DLH DKI Jakarta, Wahyudi Rudiyanto mengatakan tidak terjadi penolakan saat penyegelan.

"Baru 4 yang kami segel. Sementara baru 3 stokpile batu bara dan 1 pabrik baja," kata Yudi, Selasa (19/9).

Dari data yang diperoleh, keempat 4 perusahaan itu adalah:

1. PT Trada Trans Indonesia disegel pada 30 Agustus 2023, dengan penerbitan sanksi Nomor e-0073 pada 24 Maret 2023

2. PT Trans Bara Energy disegel pada 30 Agustus 2023 dengan penerbitan sanksi Nomor e-0054 pada 27 Februari 2023

3. PT Bahana Indokarya disegel pada 31 Agustus 2023 penerbitan sanksi Nomor e-0083 pada 10 April 2023

4. PT Jakarta Central Asia Steel perusahaan baja yang disegel pada 13 September 2023 penerbitan sanksi Nomor e-0154 pada 5 September 2023.

Yudi menjelaskan penyegelan dilakukan melalui proses komunikasi terlebih dahulu kepada perusahaan

yang bersangkutan. Empat perusahaan itu saat ditinjau ulang ternyata tidak menerapkan evaluasi yang diberikan. Setelah itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI memutuskan melakukan penyegelan.

"Sebenarnya kami sudah mengawasi beberapa perusahaan," ucapnya.

Karena terbukti tidak mematuhi evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Yudi mengatakan pada saat proses penyegelan, tidak terjadi penolakan dari 4 perusahaan itu.

"Kebanyakan karena kami evaluasi sanksi, mereka menyadari bahwa salah. Kami kan gak asal memberikan sanksi, dievaluasi dulu, pas kami evaluasi masih tidak memenuhi yang diarahkan gitu makanya kita segel," tuturnya.

Jika setelah penyegelan tidak ada perbaikan, atau perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang terindikasikan menyumbang polusi udara, DLH DKI akan melakukan proses hukum ke Polda Metro Jaya.

"Kami sesuai dengan Permen KLHK Nomor 22 mereka diberi waktu 120 hari, kami evaluasi sanksinya kemudian baru ditingkatkan menjadi penyegelan," tuturnya. ● yan

Ketua DPRD Sesalkan Mendagri Tito Pilih Pj Walkot Bekasi Bukan dari Usulan

BEKASI (IM) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, M Saifuddin mengatakan hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mempertimbangkan nama yang diusulkan untuk menjadi penjabat wali kota (pj walkot) Bekasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Raden Gani Muhammad sebagai Pj Walkot Bekasi menggantikan Tri Adhianto. Mereka adalah Makmur Marbun (direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri), Koswara Hanafi (Kadishub Provinsi Jabar), dan Kusnanto Saidi (direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi)

Sementara tiga kandidat yang diusulkan Pemprov Jabar adalah Makmur Marbun (direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri), Koswara Hanafi (Kadishub Provinsi Jabar), dan Junaedi (sekretaris daerah Kota Bekasi).

Politikus PKS itu mengakui, memang pada prinsipnya penunjukan pj kepala daerah menjadi kebijakan Kemendagri. DPRD sifatnya

sesuai peraturan hanya mengusulkan, bukan menentukan. Namun, tetap saja harusnya yang menjadi pj adalah figur yang menjadi pjs

"Yang terpenting bagi saya adalah pj wali kota itu nantinya mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan DPRD. Ini juga jadi satu catatan tersendiri bagi kita.

Karena nama yang ada saat ini bukan dari nama-nama yang kita usulkan," ujar Saifuddin.

"Karena kebijakan itu ada di Kemendagri dan memang kita juga diberikan hak usulan, hak usulan itu kita lakukan ya karena sesuai juga dengan peraturan Kermendagri, dalam upaya agar orang-orang yang diusulkan menjadi bagian perlu pertimbangan," katanya.

Saifuddin mengaku, penunjukan nama pj walkot Bekasi menjadi catatan bagi dewan. Dia pun memberi pesan, Raden Gani harus bisa bersinergi dengan DPRD dalam melanjutkan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi. Pasalnya, penyelenggaraan pemerintah daerah tidak bisa dilakukan oleh walkot secara mandiri. ● yan

FOTO: ANTARA



PELATIHAN TANGGAP BENCANA DI SEKOLAH

Petugas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) (kiri) memberikan pelatihan kepada Santri Madrasah Aliyah (kanan) cara pemasangan pelampung saat kondisi darurat di MAS Persis 69, Matraman, Jakarta, Selasa (19/9). Kegiatan SMAB (Sekolah Madrasah Aman Bencana) yang diadakan BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di lingkungan sekolah.

PENGUMUMAN

PT Trias Spunindo Industri, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan, bahwa berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trias Spunindo Industri No. 61 tanggal 20 Februari 2023, dibuat dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan 4.000 saham baru, dimana 3.900 dari nilai saham baru tersebut akan disetor dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada PT Multi Spunindo Jaya dan PT Trias Sentosa Tbk.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham.

Sidoarjo, 20 September 2023
Perseroan
Direksi

PENAWARAN UMUM

REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA CAPITAL ("REKSA DANA") dengan rincian sebagai berikut :

1. REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 2 yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1474/PM.02/2023 tanggal 29 Mei 2023. Penawaran Umum atas Unit Penyerahan REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 2 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyerahan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyerahan pada Masa Penawaran

Setiap Unit Penyerahan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada masa penawaran.

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyerahan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

SYAILENDRA reksadana
Jakarta, 20 September 2023
Manajer Investasi
PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

"INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJERAMIN KINERJA MASA DATANG. PT SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN".